

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Aslan. 2020. Kedudukan Otonomi Desa Dalam Otonomi Daerah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Marbun. B.N. 2000. Proses Pembangunan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Marselina, Ara Lili. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.
- Ryass Rasyid. 2007. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2000. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soenardjo, U. 1984. Tinjauan Singkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. 2017. Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Thafa Media.
- Surasih, Maria Eni. 2006. Pemerintahan Desa dan Implementasinya. Jakarta: Erlangga.
- Syafrudin. Ateng. 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bandung: Binacipta.
- Wasistono, Sadu., & Irwan Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja. 2007. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2003. Pemerintahan Desa / Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husin, Taqwaddin. 2020. Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Aceh: Ombudsman
- Sofi, Irfan. 2020. Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa. Indonesian Treasury Review. Jakarta: Kementerian Keuangan

Rismaharini, Tri. 2020. Kartu Keluarga Sejahtera Online Bagi Pmks. Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial

Lathifah, Nur. 2020. Mengenal Lebih Dekat Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Palangkaraya: Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Iklil, Muhammad. 2020. Problematika Penyaluran BLT Dana Desa. Jakarta: Info Anggaran

Abidin, Said Zainal. 2012. Bantuan Langsung Tunai dan Dampaknya. Jakarta: Detik News

Nurjiah. 2020. Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lombok Barat

Purwanto. 2020. Lakukan Musyawarah Desa Khusus untuk Tetapkan Penerima Bantuan. Semarang : jatengprov.go.id pada 23 Maret 2022.

### **Jurnal**

Ayu, A., Siahainenia, R., & Kudubun, E. 2020. Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2).

Faturrahman, F., Saleh, M., Pathissana, M., & Haryanti, E. 2020. Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal TAMBORA*, 4 (2A).

Martajaya, Alif., & Dani Sugiri. 2021. Implementasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Karanganom Kabupaten Klaten. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 9 (2).

Nurjoko. 2015. Sistem Pendukung Keputusan Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). *Jurnal TIM Darmajaya* 1(2), 203-217.

Selviana. 2016. Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium*, 3(2): 2339-2401.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Disahkan Di Jakarta Pada Tanggal 15 Januari 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keyiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Desa.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.